

Abstrak

Penelitian ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui, mengkritisi serta menganalisis bagaimana pengaturan dan kedudukan perjanjian hipotek dalam perjanjian Kredit Perbankan (2) Untuk mengetahui, mengkritisi serta menganalisis kewenangan pembebanan hipotek kapal laut, yang dilakukan oleh Notaris berbasis nilai keadilan (3) Untuk melakukan rekonstruksi hukum atas pembebanan hipotek kapal laut pada perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Kedudukan Perjanjian Hipotek pada Perjanjian Kredit Perbankan sebagai perjanjian tambahan merujuk pada beberapa norma yang berhubungan dengan pelayaran, Jabatan Notaris, Perbankan dan Perjanjian ; bahwa Pembebanan kapal laut sebagai obyek jaminan saat ini dilakukan dengan akta otentik yang tidak berdiri sendiri sehingga berdampak pada perwujudan nilai keadilan bagi para pihak; Rekonstruksi hukum yang ideal dalam pembebanan hipotek kapal laut di Indonesia harus memenuhi prinsip otentisitas dan prinsip efisiensi. Prinsip otentisitas akta dalam pembebanan hipotek kapal laut berpotensi terdegradasi oleh alur dan prosedur pembebanannya yang melibatkan banyak pihak. Prinsip efisiensi sangat berguna bagi pembebanan kapal laut dengan menjadikan Notaris sebagai Pejabat yang berwenang membuat akta otentik hipotek kapal laut berdasarkan grosse kapal yang dibuat syahbandar saja. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar regulasi pembebanan kapal laut segera mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dan prinsip efisiensi dalam berbisnis. Menginisiasi pemerintah untuk menerapkan pendaftaran dan pembebanan secara elektronik. Kedudukan Perjanjian Hypotek pada Perjanjian Kredit Perbankan sebagai perjanjian tambahan merujuk pada beberapa norma yang berhubungan dengan pelayaran, Jabatan Notaris, Perbankan dan Perjanjian para pihak. dapat di simpulkan Pembebanan kapal laut sebagai obyek jaminan saat ini dilakukan dengan akta otentik yang tidak berdiri sendiri ini, menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Rekonstruksi hukum yang ideal dalam pembebanan hypotek kapal laut di Indonesia harus memenuhi prinsip otentisitas dan prinsip efisiensi. Prinsip otentisitas akta dalam pembebanan hypotek kapal laut berpotensi terdegradasi oleh alur dan prosedur pembebanannya yang melibatkan banyak pihak.

Kata Kunci : Pembebanan, Hipotek , Kapal Laut, Notaris

RECONSTRUCTION OF MARITIME SHIP MORTGAGE CHARGING ARRANGEMENTS IN FAIR VALUE-BASED BANKING CREDIT AGREEMENTS

Abstract

This research aims; (1) To find out, criticize and analyze the position of mortgage agreements in Banking Credit agreements (2) To find out, criticize and analyze mortgage charges on ships, carried out by a Notary based on justice values (3) To carry out legal reconstruction of mortgage charges on ships in banking credit agreements. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this research show that; The position of the Mortgage Agreement in the Banking credit Agreement as an additional agreement refers to several norms relating to shipping, Notary Positions, Banking and Agreements; that encumbrances on ships as objects of collateral are currently carried out with authentic deeds which do not stand alone so that they have an impact on the realization of the value of justice for the parties; The ideal legal reconstruction in the imposition of maritime mortgages in Indonesia must fulfill the principles of authenticity and efficiency. The principle of authenticity of deeds in the assignment of maritime mortgages has the potential to be degraded by the flow and procedures of the assignment which involve many parties. The principle of efficiency is very useful for encumbrances on ships by making a Notary an Official who has the authority to make authentic deeds of mortgages on ships based on the grosse of the ship made by the harbormaster only. The recommendation from this research is that maritime shipping regulations immediately follow developments in legal requirements and principles of efficiency in business. Initiate the government to implement electronic registration and charging. The position of the Mortgage Agreement in the Banking Credit Agreement as an additional agreement refers to several norms relating to shipping, Notary Positions, Banking and the Agreement of the parties. It can be concluded that encumbrances on ships as objects of collateral are currently carried out with authentic deeds which do not stand alone, causing injustice to the parties. The ideal legal reconstruction in the imposition of mortgages on maritime vessels in Indonesia must fulfill the principle of authenticity and efficiency. The principle of authenticity of deeds in the imposition of mortgages on maritime vessels has the potential to be degraded by the flow and procedures of encumbrance which involve many parties

Keywords: *Encumbrance, Mortgage, Ship, Notary*